



Menulis Ulang Keadilan: Bagaimana Doktrin *Suppression of Evidence* dalam Preseden Amerika Serikat Menata Kembali Prosedur Peradilan Pidana

Zul Khaidir Kadir^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Korespondensi penulis: zulkhaidirkadir@gmail.com

Abstract. *Suppression of evidence is one mechanism to ensure that law enforcement actions that violate constitutional rights will not produce evidence that can be used in court. Unfortunately, this doctrine is valued for its ability to ensure that the law enforcement process is carried out in accordance with applicable legal rules, as well as maintaining a balance between state power and individual freedom. On the other hand, the application of this doctrine can acquit perpetrators of crimes suspected of committing substantial crimes only because of minor procedural errors made by law enforcement. This study uses a data collection method collected using library research, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study indicate that the doctrine of suppression of evidence has proven to be an important mechanism in maintaining a balance between individual constitutional rights and the state's need to enforce the law effectively. In the United States, the exclusionary rule and its various exceptions serve as a barrier to abuse of power by the state and law enforcement, especially in the context of unauthorized searches and seizures. Although it raises concerns that the criminal justice system is becoming less effective, this doctrine remains important in protecting individual constitutional rights in the United States.*

Keywords: *Suppression of Evidence, Precedent, United States.*

Abstrak. *Suppression of evidence* merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional tidak akan menghasilkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Sayangnya, doktrin ini dihargai karena kemampuannya untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Di sisi lain, penerapan doktrin ini dapat membebaskan pelaku kejahatan yang diduga melakukan tindak pidana secara substansial hanya karena kesalahan prosedural kecil yang dilakukan oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin *suppression of evidence* telah terbukti sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak konstitusional individu dan kebutuhan negara untuk menegakkan hukum secara efektif. Di Amerika Serikat, *exclusionary rule* dan berbagai pengecualiannya berfungsi sebagai penghalang terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan penegak hukum, terutama dalam konteks penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. Walaupun memicu kekhawatiran bahwa sistem peradilan pidana menjadi kurang efektif, doktrin ini tetap penting untuk melindungi hak-hak konstitusional individu di Amerika Serikat

Kata kunci: *Suppression of Evidence, Preseden, Amerika Serikat.*

LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, doktrin *suppression of evidence* merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional tidak akan menghasilkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan. *Suppression of evidence*, atau penekanan bukti, adalah sebuah prosedur yang memungkinkan seorang terdakwa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyingkirkan, mengecualikan, atau menekan bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum. Doktrin ini bukan hanya penting dalam menjamin perlindungan hak individu, tetapi juga dapat berdampak signifikan terhadap investigasi pidana secara keseluruhan, hingga pada titik penghentian investigasi.

Fokus utama dari *suppression of evidence* adalah melindungi hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat, yang melarang penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar.¹ Ketika penegak hukum gagal mematuhi aturan ini, setiap bukti yang diperoleh dari tindakan ilegal tersebut dapat ditekan, atau dilarang untuk digunakan dalam proses pengadilan. Instrumen utama yang digunakan oleh pengadilan untuk menegakkan hak adalah melalui penerapan *exclusionary rule* (aturan pengecualian), yang melarang penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah. *Exclusionary rule* dimaksudkan untuk menghalangi praktik penegakan hukum yang melanggar hukum dan memberikan insentif bagi kepatuhan terhadap prosedur hukum yang sah.

Jika dikaji dalam kontes yang lebih luas, *suppression of evidence* bukan hanya merupakan alat untuk melindungi terdakwa, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang mempertahankan integritas sistem peradilan pidana. Melalui mekanisme ini, pengadilan memastikan bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum tidak diberi legitimasi dalam proses hukum. Dengan demikian, doktrin ini berfungsi sebagai penyeimbang penting antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sayangnya, di sisi lain, tindak lanjut dari penekanan bukti bisa saja lebih luas daripada sekadar tidak diterimanya bukti dalam persidangan. Dalam banyak kasus, ketika bukti yang menjadi bukti “kunci” ditekan, seluruh proses investigasi bahkan dapat dihentikan. Hal ini terjadi karena bukti yang ditekan merupakan bagian penting dari investigasi atau elemen utama yang mendasari dakwaan terhadap terdakwa. Tanpa bukti tersebut, proses penuntutan akan kehilangan dasar hukumnya untuk melanjutkan kasus, sehingga pada fase investigasi

¹ Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2020). *Hukum Acara Pidana Adversarial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

harus dihentikan. *Suppression of evidence* berfungsi sebagai alat yang efektif untuk membatasi penyelidikan yang dilakukan dengan cara-cara ilegal dan melindungi hak-hak terdakwa.

Namun, seperti banyak aspek dalam hukum pidana, doktrin *suppression of evidence* tidak lepas dari kontroversi. Di satu sisi, doktrin ini dihargai karena kemampuannya untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Di sisi lain, penerapan doktrin ini dapat membebaskan pelaku kejahatan yang diduga melakukan tindak pidana secara substansial hanya karena kesalahan prosedural kecil yang dilakukan oleh penegak hukum, walaupun bukti yang diperoleh secara ilegal tersebut dengan jelas menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana.

Argumen yang menentang berdatangan pada kasus kejahatan yang dihadapi sangat serius, seperti kejahatan kekerasan atau terorisme, di mana hasil investigasi sangat penting bagi kepentingan publik. Dalam situasi demikian, putusan pengadilan untuk menekan bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hak dapat dianggap sebagai hambatan yang tidak perlu bagi penegakan hukum. Namun, perlu diingat bahwa tujuan utama dari doktrin ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak-hak fundamental warga negara.

Penerapan doktrin *suppression of evidence* telah melalui banyak perkembangan melalui serangkaian putusan pengadilan yang telah membentuk doktrin tersebut menjadi seperti saat ini. Kasus *Weeks v. United States* pada tahun 1914 adalah titik awal yang penting dalam sejarah penerapan *exclusionary rule*, yang secara tegas menyatakan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat digunakan dalam persidangan federal. Perkembangan besar lainnya terjadi pada tahun 1961 dengan putusan *Mapp v. Ohio*, yang memperluas penerapan *exclusionary rule* ke pengadilan negara bagian, sehingga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu di seluruh yurisdiksi di Amerika Serikat.

Namun, pengembangan doktrin *suppression of evidence* tidak berhenti di sana. Serangkaian preseden lainnya telah memperkenalkan konsep-konsep tambahan yang membatasi atau memperjelas penerapan doktrin ini. Salah satu konsep yang paling penting adalah *good faith exception*, yang diperkenalkan dalam kasus *United States v. Leon* pada tahun 1984. Konsep ini memungkinkan pengecualian terhadap *exclusionary rule* jika penegak hukum bertindak dengan itikad baik berdasarkan surat perintah yang kemudian ternyata cacat. Ini berarti bahwa bukti yang diperoleh dengan itikad baik tidak akan ditekan, meskipun

kemudian ditemukan adanya kesalahan prosedural. Konsep ini telah menciptakan keseimbangan tambahan dalam penerapan doktrin *suppression*, dengan memberikan perlindungan bagi penegak hukum yang beroperasi dalam kerangka aturan yang sah, meskipun terdapat kesalahan yang tidak disengaja.

Selain itu, perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah memperkenalkan tantangan baru dalam penerapan *suppression of evidence*. Bukti elektronik, seperti data yang diperoleh dari telepon seluler, media sosial, atau perangkat digital lainnya, sering kali memerlukan aturan tambahan untuk memastikan bahwa hak privasi tetap terjaga. Kasus-kasus seperti *Riley v. California* (2014), yang menegaskan bahwa penggeledahan terhadap telepon seluler seseorang memerlukan surat perintah, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat memperumit penerapan doktrin *suppression*. Dengan demikian, tulisan ini akan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana doktrin *suppression of evidence* telah berkembang dalam sistem hukum Amerika Serikat, terutama melalui kasus-kasus preseden yang telah membentuk doktrin ini. Lebih jauh lagi, tulisan juga mengkaji bagaimana penerapan doktrin ini dapat mengakibatkan penghentian investigasi, serta implikasi praktisnya bagi penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Evolusi *Suppression of Evidence*

Suppression of evidence dalam hukum pidana Amerika Serikat memiliki landasan kuat pada doktrin *exclusionary rule*. Doktrin ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang dijamin oleh Konstitusi, khususnya Amandemen Keempat, yang melarang penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar (*unreasonable search and seizure*). Perkembangan doktrin ini

dapat dilacak melalui serangkaian preseden penting yang telah membentuk penerapan *suppression* selama bertahun-tahun.

Salah satu preseden pertama yang membentuk dasar *exclusionary rule* adalah *Weeks v. United States* (1914). Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa bukti yang diperoleh oleh penegak hukum melalui penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah tidak dapat digunakan dalam pengadilan federal. Putusan ini mendasarkan diri pada prinsip perlindungan hak konstitusional yang terdapat dalam Amandemen Keempat. Namun, dari segi penerapan pada awalnya terbatas hanya pada pengadilan federal dan belum diterapkan secara luas di tingkat negara bagian.

Terobosan besar dalam penerapan *exclusionary rule* terjadi pada tahun 1961 melalui kasus *Mapp v. Ohio*. Kasus ini memperluas penerapan *exclusionary rule* ke pengadilan negara bagian melalui klausul proses hukum (*due process clause*) Amandemen Keempat Belas. Dollree Mapp, ditangkap dan rumahnya digeledah oleh polisi tanpa surat perintah, yang menghasilkan temuan barang bukti. Mapp kemudian didakwa berdasarkan bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa bukti yang diperoleh melalui penggeledahan yang tidak sah harus ditekan, tidak hanya di pengadilan federal tetapi juga di pengadilan negara bagian. Putusan ini memperkuat *exclusionary rule* dan memastikan penerapannya dalam skala yang lebih luas untuk melindungi hak-hak terdakwa di setiap yurisdiksi. Putusan dalam *Mapp* sangat penting dalam sejarah doktrin *suppression of evidence* karena menciptakan standar nasional bahwa semua bukti yang diperoleh secara ilegal harus ditekan.² Hal ini juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak konstitusional, seperti hak untuk tidak mengalami penggeledahan yang tidak wajar, akan diikuti oleh konsekuensi serius, termasuk bukti yang akan ditekan dari proses peradilan.

Namun, seiring waktu, Mahkamah Agung mulai memperkenalkan pengecualian terhadap *exclusionary rule* untuk memastikan bahwa aturan ini tidak diterapkan secara kaku dalam semua situasi. Pengecualian yang paling signifikan adalah *good faith exception*, yang diperkenalkan dalam kasus *United States v. Leon* (1984). Mahkamah Agung memutuskan bahwa bukti yang diperoleh oleh penegak hukum berdasarkan surat perintah penggeledahan yang kemudian dinyatakan cacat tetap dapat digunakan jika penegak hukum bertindak dengan itikad baik. Artinya, jika penegak hukum percaya bahwa surat perintah yang mereka gunakan

² Cammack, M. (2010). The Rise and Fall of the Constitutional Exclusionary Rule in the United States. *The American Journal of Comparative Law*, 58(1): 631-658.

sah, maka bukti yang mereka kumpulkan dapat diterima, meskipun surat perintah tersebut cacat secara teknis. *Good faith exception* memperkenalkan fleksibilitas dengan membedakan antara pelanggaran prosedural yang disengaja dan kesalahan yang tidak disengaja.

Mahkamah Agung juga memperkenalkan konsep *inevitable discovery rule* sebagai pengecualian lain. Dalam kasus *Nix v. Williams* (1984), Mahkamah Agung menyatakan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal dapat tetap digunakan dalam persidangan jika penuntut dapat membuktikan bahwa bukti tersebut pada akhirnya akan ditemukan melalui jalur investigasi yang sah, terlepas dari pelanggaran hak-hak konstitusional yang terjadi. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dengan kebutuhan penegakan hukum, sehingga memastikan bahwa bukti yang sah tidak hilang hanya karena kesalahan prosedural yang tidak relevan.

Selain pengecualian-pengecualian ini, Mahkamah Agung juga mengembangkan doktrin *fruit of the poisonous tree*, yang diperkenalkan dalam kasus *Silverthorne Lumber Co. v. United States* (1920). Doktrin ini memperluas jangkauan bukti yang dapat ditekan tidak hanya terhadap bukti yang diperoleh secara langsung melalui pelanggaran hak konstitusional, tetapi juga terhadap bukti turunan yang dihasilkan dari tindakan ilegal tersebut. *Fruit of the poisonous tree* menyatakan bahwa jika bukti awal diperoleh melalui pelanggaran hukum, maka semua bukti yang ditemukan sebagai hasil dari bukti ilegal tersebut juga harus ditekan.³ Sebagai contoh, jika sebuah pengakuan diperoleh melalui interogasi paksa tanpa memberi tahu tersangka hak-hak *Miranda*-nya, dan pengakuan tersebut kemudian mengarah pada penemuan bukti tambahan, maka bukti turunan tersebut juga harus ditekan.

Namun, pengecualian terhadap *fruit of the poisonous tree* juga ada. Salah satu pengecualian adalah *attenuation doctrine*, yang diperkenalkan dalam kasus *Wong Sun v. United States* (1963). *Attenuation doctrine* menyatakan bahwa bukti yang diperoleh melalui tindakan ilegal dapat digunakan jika ada jeda yang cukup atau peristiwa antara tindakan ilegal dan penemuan bukti yang memutuskan kaitan langsung antara pelanggaran dan bukti. Ini berarti bahwa jika hubungan antara pelanggaran dan bukti sudah "melemah" atau tidak langsung, bukti tersebut dapat diterima di pengadilan.

Dengan demikian, doktrin *suppression of evidence* terus berkembang melalui preseden yang beragam, yang menunjukkan kompleksitas penerapan aturan ini dalam konteks

³ Skoreiko. V. V. (2023). Inadmissible Evidence in Criminal Proceedings: Some Aspect of Applying the "Fruit of the Poisonous Tree" Doctrine. *Law and Society*, 5(1): 296-304.

penegakan hukum, agar bukti tersebut tidak dikumpulkan secara keliru.⁴ Meskipun tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional terdakwa, Mahkamah Agung juga menyadari bahwa dalam beberapa situasi, pengecualian diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan substantif tetap ditegakkan. Pengecualian yang dikembangkan mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dan kebutuhan negara dalam menegakkan hukum secara efektif.

Pengajuan *motion to suppress* atau mosi untuk menekan bukti adalah prosedur hukum yang memberikan terdakwa hak untuk menantang kredibilitas polisi legalitas bukti yang diperoleh oleh penegak hukum, dengan tujuan untuk menekan atau menghapus bukti yang diperoleh secara ilegal.⁵ Proses ini menjadi alat utama bagi terdakwa dalam membela diri terhadap penggunaan bukti yang melanggar hak-hak konstitusionalnya, terutama yang terkait dengan Amandemen Keempat, Kelima, dan Keenam. Setiap pelanggaran hak-hak ini dalam proses pengumpulan bukti memberikan alasan yang sah untuk mengajukan *motion to suppress*.

Proses untuk menekan bukti biasanya dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak terdakwa kepada pengadilan sebelum persidangan dimulai. Permohonan ini harus mencakup perincian tentang bagaimana bukti diperoleh dan argumen bahwa bukti tersebut melanggar hak-hak konstitusional terdakwa. Dalam kasus-kasus terkait Amandemen Keempat, terdakwa dapat berargumen bahwa bukti diperoleh melalui penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah, tanpa adanya surat perintah yang sah atau bukti apapun yang berasal cara yang tidak sah.⁶ Jika kasus tersebut melibatkan interogasi, terdakwa dapat mengajukan argumen bahwa hak *Miranda* mereka dilanggar, yang berarti bahwa bukti yang dihasilkan dari interogasi tersebut tidak sah.

Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan mengadakan sidang pra-persidangan untuk meninjau argumen dari kedua belah pihak, baik pihak terdakwa dan penuntut umum. Pada tahap ini, hakim mendengarkan argumen yang berkaitan dengan legalitas pengumpulan bukti dan mempertimbangkan apakah bukti tersebut seharusnya ditekan atau tidak. Saat sidang biasanya melibatkan pengumpulan bukti tambahan dan pemanggilan saksi, termasuk penegak hukum yang terlibat dalam pengumpulan bukti, untuk memastikan bahwa seluruh prosedur investigasi dilakukan sesuai dengan hukum.

⁴ Levine, K. L., Turner, J. I., & Wright, R. F. (2016). Evidence Laundering in a Post-Herring World. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 106(4): 627-680.

⁵ Liu, S., & Nir E. (2021). Mission Impossible? Challenging Police Credibility in Suppression Motions. *Criminal Justice Policy Review*, 33(6): 584-607.

⁶ Faqih, A. M. A. (2022). Evidence Derived from the Invalid Procedures and the Consequences. *Journal of King Abdulaziz University Arts and Humanities*, 30(1): 275-303.

Salah satu tugas utama hakim dalam proses ini adalah menentukan apakah ada pelanggaran konstitusional dalam pengumpulan bukti dan seberapa signifikan pelanggaran tersebut. Jika pelanggaran tersebut dianggap serius dan tidak bisa diabaikan, maka hakim akan memutuskan untuk menekan bukti tersebut. Penekanan bukti berarti bahwa bukti tersebut tidak dapat digunakan oleh jaksa dalam persidangan⁷ dan, dalam beberapa kasus, penekanan bukti dapat menyebabkan dakwaan terhadap terdakwa dibatalkan seluruhnya jika bukti tersebut merupakan elemen kunci dari kasus.

Selain itu, hakim harus mempertimbangkan apakah ada pengecualian yang dapat diterapkan dalam kasus ini. Misalnya, pengecualian *good faith* dapat berlaku jika penegak hukum bertindak berdasarkan keyakinan yang masuk akal bahwa mereka mengikuti prosedur hukum yang sah, meskipun ternyata ada kesalahan prosedural. Hal ini biasanya terjadi ketika surat perintah penggeledahan ternyata tidak sah, tetapi penegak hukum tetap bertindak dengan itikad baik. Dalam situasi seperti itu, hakim mungkin memutuskan bahwa bukti tidak harus ditekan.

Contoh lain dari pengecualian yang sering dipertimbangkan adalah doktrin *inevitable discovery*. Pengecualian ini berlaku jika penuntut dapat membuktikan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal pada akhirnya akan ditemukan melalui jalur investigatif yang sah, terlepas dari pelanggaran yang terjadi. Dalam kasus seperti itu, meskipun ada pelanggaran hak-hak konstitusional terdakwa, bukti tetap dapat digunakan karena akan ditemukan dengan cara yang sah di kemudian hari.

Penerapan *motion to suppress* ditunjukkan *Mapp v. Ohio* (1961), di mana pengadilan memutuskan bahwa penggeledahan rumah Dollree Mapp oleh polisi tanpa surat perintah melanggar Amandemen Keempat, dan bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut harus ditekan. Kasus ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan doktrin *suppression* dan memperluas penerapannya ke pengadilan negara bagian. Dalam kasus lain, *United States v. Jones* (2012), penempatan alat pelacak GPS di mobil tersangka tanpa surat perintah juga menghasilkan penekanan bukti. Mahkamah Agung memutuskan bahwa penggunaan alat pelacak GPS tanpa surat perintah melanggar Amandemen Keempat dan oleh karena itu, bukti yang diperoleh bahkan dengan menggunakan teknologi modern melalui pelacakan tersebut harus ditekan.

⁷ Shapiro, S. J. (1990). Reviewing the Unreviewable Judge: Federal Prosecution Appeals of Mid-Trial Evidentiary Rulings. *The Yale Law Journal*, 99(4): 905-924.

Penekanan bukti tidak hanya melindungi hak-hak terdakwa, tetapi juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap penegak hukum, memastikan bahwa setiap tindakan investigatif dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak ada pengawasan melalui mekanisme seperti *motion to suppress*, ada risiko bahwa penegak hukum akan bertindak di luar batasan yang ditetapkan oleh Konstitusi. Oleh karena itu, proses ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kewenangan negara dalam menegakkan hukum.

Walau demikian, tidak semua bukti yang ditekan dapat berhasil.⁸ Pengadilan sering kali harus membuat penilaian yang sangat cermat terkait apakah pelanggaran prosedural benar-benar signifikan dan apakah ada justifikasi untuk menekan bukti. Sebagai contoh, dalam kasus di mana pelanggaran dianggap sebagai kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan kecil dalam prosedur, hakim mungkin menolak permohonan untuk menekan bukti, terutama jika bukti tersebut relevan dengan kasus yang sedang berjalan. Dengan memberikan pengawasan yang ketat terhadap tindakan investigatif, *motion to suppress* memastikan bahwa bukti yang digunakan dalam pengadilan telah diperoleh melalui proses yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dampak dan Kritik *Suppression of Evidence* pada Proses Peradilan Pidana

Doktrin *suppression of evidence* tidak hanya mempengaruhi hasil persidangan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan investigasi pidana. Penekanan bukti yang diperoleh secara ilegal sering kali dapat menghentikan investigasi atau setidaknya merusak landasan dari kasus yang dibangun oleh penuntut. Dalam banyak kasus, bukti yang ditekan merupakan elemen kunci dalam dakwaan atau investigasi, dan tanpa bukti tersebut, penuntut sering kali kehilangan dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan kasus.

Dalam kasus di mana bukti utama ditekan, investigasi dapat menjadi tidak efektif dan tidak dapat berlanjut ke proses penuntutan. Penekanan bukti tidak hanya mempengaruhi hasil dari satu kasus, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang luas terhadap bagaimana penegak hukum merancang strategi investigasi mereka di masa depan. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana narkoba, barang bukti fisik yang ditemukan selama penggeledahan sering menjadi landasan utama dakwaan. Jika barang bukti tersebut ditekan karena pelanggaran prosedural seperti penggeledahan tanpa surat perintah yang sah, maka proses investigasi tidak

⁸ Nie, E. (2019). Empowering the Exclusionary Rule: Using Suppressing Motion Data to Improve Police Searches and Searches in the United States. *International Journal of Police Science & Management*, 22(1): 96-107.

dapat diteruskan ke penuntutan atau harus dihentikan karena secara konseptual sudah kehilangan bukti utama yang menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana yang dituduhkan.

Kasus *Wong Sun v. United States* (1963) adalah contoh penting yang menggambarkan bagaimana *suppression of evidence* dapat mempengaruhi jalannya investigasi. Mahkamah Agung menekan bukti pengakuan yang diberikan oleh terdakwa setelah ditangkap secara ilegal. Meskipun pengakuan tersebut relevan dengan investigasi, pelanggaran hak-hak terdakwa selama proses penangkapan membuat pengakuan tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Akibatnya, penuntut umum kehilangan bukti penting yang seharusnya dapat memperkuat dugaannya. Kecuali terdapat *attenuation*, yang memungkinkan penggunaan bukti dalam kasus di mana ada jeda yang cukup antara pelanggaran hak dan bukti yang diperoleh.

Selain itu, penekanan bukti yang diperoleh melalui pengawasan elektronik tanpa surat perintah, seperti dalam kasus *United States v. Jones* (2012), menunjukkan bagaimana penerapan doktrin *suppression* dapat memaksa penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi modern dalam investigasi pidana. Dalam kasus *Jones*, Mahkamah Agung memutuskan bahwa penggunaan alat pelacak GPS pada kendaraan tanpa surat perintah melanggar Amandemen Keempat. Bukti yang diperoleh dari pelacakan tersebut ditekan, menyebabkan investigasi terhadap tersangka kehilangan elemen bukti kunci.

Implikasi dari penekanan bukti yang diperoleh secara ilegal juga mendorong penegak hukum untuk mengembangkan strategi investigasi yang lebih canggih dan hati-hati. Dalam banyak kasus, penegak hukum harus memastikan bahwa setiap langkah investigatif dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena setiap kesalahan prosedural dapat berujung pada penekanan bukti. Oleh karena itu, ada peningkatan fokus pada pelatihan penegak hukum mengenai pengumpulan bukti yang sah dan penggunaan surat perintah yang benar untuk menghindari risiko kehilangan bukti penting.

Namun, dampak dari *suppression of evidence* juga dapat dilihat dari perspektif keadilan. Penekanan bukti yang diperoleh secara ilegal dianggap sebagai kemenangan bagi keadilan prosedural dan hak-hak individu. Penegakan hak-hak konstitusional, terutama hak terhadap penggeledahan yang tidak wajar, bisa saja menjadi prioritas utama dalam penerapan doktrin *suppression*. Kendatipun hal ini dapat mengakibatkan terdakwa lolos dari dakwaan, pendukung doktrin ini berpendapat bahwa melindungi hak-hak konstitusional lebih penting daripada memastikan semua pelaku kejahatan dihukum. Tanpa mekanisme tersebut, penegak

hukum mungkin akan lebih cenderung melanggar prosedur yang sah,⁹ yang pada akhirnya dapat merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Selain memengaruhi investigasi yang sedang berlangsung, *suppression of evidence* juga memiliki dampak jangka panjang terhadap cara kerja lembaga penegak hukum. Banyak lembaga penegak hukum yang sekarang menggunakan cara yang lebih teliti bahkan canggih untuk memastikan bahwa pengumpulan bukti tidak melanggar hak konstitusional terdakwa. Misalnya, lembaga penegak hukum yang kini menggunakan perangkat lunak khusus untuk memastikan bahwa data digital yang dikumpulkan selama investigasi berada dalam batas-batas hukum dan diakses sesuai dengan prosedur yang sah.

Teknologi modern juga memberikan tantangan baru bagi penegak hukum, terutama dalam hal pengumpulan bukti digital dan pengawasan elektronik. Bukti digital yang diambil dari ponsel, komputer, atau perangkat elektronik lainnya menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan hak-hak konstitusional. Putusan Mahkamah Agung dalam *Riley v. California* (2014) yang menetapkan bahwa polisi memerlukan surat perintah untuk menggeledah ponsel tersangka, menunjukkan bagaimana pengadilan terus menyesuaikan doktrin *suppression* untuk menghadapi tantangan baru yang muncul dari perkembangan teknologi.

Bukti digital juga dapat menimbulkan masalah dalam hal cakupan surat perintah. Jika surat perintah penggeledahan hanya mencakup file-file tertentu, penegak hukum tidak diizinkan untuk memeriksa file lain yang ditemukan dalam perangkat elektronik.¹⁰ Jika bukti yang ditemukan berada di luar lingkup surat perintah, bukti tersebut dapat ditekan berdasarkan pelanggaran hak privasi terdakwa. Dengan menekan bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah maka akan memaksa penegak hukum untuk lebih cermat dalam merancang surat perintah dan memastikan bahwa cakupannya jelas dan terbatas pada informasi yang relevan dengan investigasi.

Tidak hanya sampai disitu, tantangan lain muncul dari pengawasan elektronik, seperti pelacakan GPS. Dalam kasus *United States v. Jones* (2012), Mahkamah Agung menekan bukti yang diperoleh melalui pelacakan GPS tanpa surat perintah. Kasus ini menegaskan bahwa meskipun teknologi memungkinkan penegak hukum untuk memantau gerakan tersangka dengan lebih mudah, pengumpulan data semacam itu tetap tunduk pada batasan

⁹ Gau, J. M. (2015). Procedural Injustice, Lost Legitimacy, and Self-Help. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 31(2): 132-150.

¹⁰ Kerr, O. S. (2015). Executing Warrants for Digital Evidence: The Case for Use Restrictions on Nonresponsive Data. *Texas Tech Law Review*, 48(1): 1-36.

Amandemen Keempat. Penegak hukum harus memiliki surat perintah yang sah sebelum menggunakan teknologi pengawasan yang invasif, seperti alat pelacak GPS atau perangkat lunak pengawasan digital.

Penggunaan teknologi baru seperti perangkat lunak untuk memantau komunikasi online, pengawasan melalui kamera CCTV, serta alat pengawasan massal lainnya, juga menghadirkan tantangan bagi penerapan *suppression of evidence*. Penegak hukum dihadapkan pada dilema untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hak privasi individu sambil tetap mengumpulkan bukti yang sah untuk mendukung investigasi.¹¹ Jika data yang diperoleh melalui pengawasan elektronik melanggar hak-hak konstitusional terdakwa, bukti tersebut dapat ditekan, yang berpotensi menghancurkan investigasi yang sedang berlangsung.

Selain itu, alat forensik digital yang digunakan untuk mengekstraksi data dari perangkat elektronik juga menimbulkan risiko bagi penerapan *suppression of evidence*.¹² Hal ini karena perangkat lunak secara otomatis dapat mengakses seluruh sistem perangkat elektronik tersangka, yang dapat menghasilkan pengumpulan data yang berada di luar lingkup surat perintah. Jika pengadilan menemukan bahwa penegak hukum melampaui batasan yang ditetapkan oleh surat perintah, bukti yang diperoleh melalui penggeledahan tersebut dapat ditekan.

Perdebatan yang intens dalam sistem hukum pidana Amerika Serikat turut menyertai seiring penerapan dan dampak dari penekanan bukti. Di satu sisi, doktrin ini dianggap sebagai mekanisme yang penting untuk melindungi hak-hak konstitusional terdakwa, khususnya hak yang dijamin oleh Amandemen Keempat terkait dengan penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penerapan ketat *exclusionary rule* dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif dan, dalam beberapa kasus, menyebabkan pelaku kejahatan lolos dari hukuman karena kesalahan prosedural oleh penegak hukum.

Topik utama perdebatan terhadap *suppression of evidence* adalah bahwa penekanan bukti yang jelas memberatkan jelas dapat merugikan kepentingan publik. *Exclusionary rule* memberikan justifikasi bagi pelaku untuk fokus pada kesalahan teknis dalam proses pengumpulan bukti, bukan pada substansi bukti itu sendiri.¹³ Terdakwa yang sebenarnya bersalah dapat bebas dari hukuman karena bukti yang memberatkan mereka ditekan akibat

¹¹ Natamiharja, R., Sabatira, F., Banjarani, D. R., Davey, O. M., & Setiawan, I. (2022). Balancing Two Conflicting Perspectives on Wiretapping Act: Rights to Privacy and Law Enforcement. *Al Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(1): 18-30.

¹² Ridder, C. K. (2009). Evidentiary Implications of Potential Security Weaknesses in Forensic Software. *International Journal of Digital Crime and Forensics*, 1(3): 80-91.

¹³ Calabresi, G. (2003). The Exclusionary Rule. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 26(1): 111-118.

kesalahan teknis atau prosedural yang dilakukan oleh penegak hukum. Doktrin ini juga tidak selalu berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Penekanan bukti terutama dalam kasus-kasus kejahatan berat, dianggap sebagai "hadiah" bagi pelaku kejahatan. Akibatnya, doktrin ini dianggap lebih melindungi pelaku kejahatan daripada mendorong penegakan hukum yang adil dan efektif. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau bahkan terorisme, penekanan bukti yang diperoleh secara ilegal bisa berdampak fatal terhadap keseluruhan investigasi. Jika bukti kunci seperti senjata pembunuhan atau pengakuan tersangka ditekan karena pelanggaran prosedural, investigasi dapat dihentikan.

Namun, di sisi lain, pendukung *suppression of evidence* menegaskan bahwa doktrin ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Tanpa adanya aturan yang ketat seperti *exclusionary rule*, ada risiko besar bahwa penegak hukum akan cenderung melanggar hak-hak individu selama proses investigasi, karena mereka tahu bahwa bukti yang diperoleh melalui cara-cara ilegal masih dapat digunakan di pengadilan. Dalam hal ini, *suppression of evidence* berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang kuat untuk mendorong penegak hukum agar mematuhi prosedur hukum yang sah.¹⁴

Pendukung doktrin ini juga berpendapat bahwa *exclusionary rule* tidak hanya melindungi terdakwa, tetapi juga menjaga integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena hal tersebut menunjukkan bahwa negara bersedia melanggar hak-hak konstitusional untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Dalam jangka panjang, penerapan aturan yang adil dan konstitusional, termasuk doktrin *suppression*, dianggap sebagai landasan penting bagi sistem hukum yang adil dan demokratis.

Untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak konstitusional terdakwa dan kebutuhan negara untuk menegakkan hukum secara efektif, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memperkenalkan beberapa pengecualian terhadap *exclusionary rule*. Salah satu pengecualian yang paling penting adalah *good faith exception*, yang memungkinkan bukti yang diperoleh dengan itikad baik oleh penegak hukum untuk tetap digunakan di pengadilan, bahkan jika ternyata ada kesalahan prosedural dalam surat perintah penggeledahan. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa jika penegak hukum bertindak berdasarkan keyakinan

¹⁴ Bilz, K. (2012). Dirty Hands or Deterrence? An Experimental Examination of the Exclusionary Rule. *Journal of Empirical Legal Studies*, 9(1): 149-171.

yang sah bahwa mereka mengikuti prosedur yang benar, tidak adil untuk menekan bukti yang diperoleh dari tindakan tersebut.

Selain *good faith exception*, *inevitable discovery rule*, seperti yang terlihat dalam kasus *Nix v. Williams* (1984) memberi pedoman bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal dapat tetap digunakan jika penegak hukum dapat membuktikan bahwa bukti tersebut akan ditemukan secara sah melalui jalur investigasi yang sah. *Inevitable discovery rule* memberikan fleksibilitas tambahan bagi penuntut untuk tetap menggunakan bukti yang mungkin akan ditemukan meskipun ada pelanggaran hak-hak konstitusional selama proses investigasi. Akan tetapi pengecualian ini juga memicu perdebatan baru walaupun membantu mengurangi dampak negatif dari penerapan ketat *exclusionary rule*. Pengecualian ini bisa disalahgunakan oleh penegak hukum untuk membenarkan pelanggaran hak-hak individu, dengan mengandalkan pengecualian tersebut sebagai alasan untuk tidak mematuhi prosedur yang benar. Ada kekhawatiran bahwa dengan semakin banyaknya pengecualian yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung, tujuan asli dari *exclusionary rule* bisa terpinggirkan.

Perdebatan tentang doktrin *suppression of evidence* bahkan meluas ke konteks internasional. Meskipun Amerika Serikat menerapkan *exclusionary rule* secara ketat, banyak negara lain tidak memiliki aturan yang serupa atau memberikan pengadilan lebih banyak diskresi untuk memutuskan apakah bukti yang diperoleh secara ilegal dapat digunakan. Misalnya, di Inggris dan beberapa negara Eropa, pengadilan memiliki wewenang lebih besar untuk menilai apakah bukti yang diperoleh secara tidak sah dapat tetap diterima. Di beberapa negara lain, pengadilan lebih menekankan pada relevansi bukti daripada cara pengumpulannya. Meskipun hak-hak terdakwa tetap dihormati, penekanan terhadap keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa pelaku kejahatan yang bersalah dihukum juga mendapat perhatian yang berimbang.¹⁵ Pendekatan ini berbeda dengan fokus Amerika Serikat yang lebih berat pada keadilan prosedural dan perlindungan hak konstitusional.¹⁶ Perbandingan internasional ini menunjukkan bahwa setiap yurisdiksi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap keseimbangan antara hak individu dan penegakan hukum.

Di berbagai yurisdiksi, doktrin yang serupa dengan *suppression of evidence* diterapkan dengan cara yang berbeda atau, dalam beberapa kasus, tidak diterapkan sama sekali. Sistem hukum Inggris memiliki sejarah yang berbeda dalam menangani bukti yang diperoleh secara

¹⁵ Summers, S. J. (2023). The Epistemic Ambitions of the Criminal Trial: Truth, Proof, and Rights. *International Journal on Evidential Legal Reasoning*, 4(1): 249-272.

¹⁶ Agnatieva, A. I. (2021). Features of Personal Rights and Freedoms in the United States. *Almanac of International Law*, 25(1): 57-64.

ilegal dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di Inggris, tidak ada doktrin yang ketat seperti *exclusionary rule* dalam sistem hukum pidana.¹⁷ Sebaliknya, pengadilan di Inggris memiliki lebih banyak diskresi untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak bukti yang diperoleh secara melawan hukum.

Di Jerman, prinsip *verwertungsverbot* atau larangan penggunaan bukti mengatur bagaimana bukti yang diperoleh secara melawan hukum diperlakukan di pengadilan. Pendekatan ini tidak seketat *exclusionary rule* di Amerika Serikat, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.¹⁸ Prinsip ini memungkinkan pengadilan untuk menolak bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hak-hak terdakwa, seperti pelanggaran terhadap privasi atau hak untuk tetap diam. Sedangkan dalam sistem hukum Belanda juga memiliki pendekatan yang berbeda terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal. Di Belanda, prinsip bahwa persidangan harus adil dan tidak merugikan terdakwa adalah landasan utama dalam penentuan apakah bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hukum dapat diterima di pengadilan. Meskipun tidak ada doktrin ketat seperti *exclusionary rule* di Amerika Serikat, pengadilan Belanda cenderung lebih berfokus pada keadilan prosedural.¹⁹

Sebagai perbandingan, sistem hukum Amerika Serikat lebih ketat dalam penerapan *suppression of evidence* dibandingkan negara-negara lain seperti Inggris, Jerman, atau Belanda. *Exclusionary rule* yang diterapkan di Amerika Serikat secara otomatis menekan bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hak konstitusional, terutama yang dilindungi oleh Amandemen Keempat. Perbedaan utama dengan negara lain adalah penerapan *exclusionary rule* dalam kasus pelanggaran hak konstitusional, tanpa memandang relevansi bukti terhadap kejahatan yang diselidiki.²⁰ Di negara-negara seperti Inggris atau Jerman, pengadilan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut cukup signifikan untuk menekan bukti. Sementara itu, di Amerika Serikat, pelanggaran

¹⁷ Simović, M. N., & Hrustić (2020). The Main Characteristics of Criminal Proceedings in England. *Godišnjak Pravnog Fakulteta u Banja Luci*, 42(1): 9-42.

¹⁸ Ma, Y. (1999). Comparative Analysis of Exclusionary Rules in the United States, England, France, Germany, and Italy. *Policing*, 22(3): 280-303.

¹⁹ Ansems, L. F. M., Bos, K. V. D., & Mak, E. (2020). Speaking of Justice: A Qualitative Interview Study on Perceived Procedural Justice Among Defendants in Dutch Criminal Cases. *Law & Society Review*, 54(3): 643-679.

²⁰ Kurniawan, Z., Tisnanta, H. S., Fakhri, M., & Ferdiansyaah, A. I. (2022). Exclusionary Rule Principle and Constitutional Rights Protection in Evidence Seeking. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 10(4): 864-871.

prosedural sering kali dianggap sebagai alasan yang cukup untuk menekan bukti, terlepas dari konteks atau kepentingan publik yang lebih luas.

KESIMPULAN

Doktrin *suppression of evidence* telah terbukti sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak konstitusional individu dan kebutuhan negara untuk menegakkan hukum secara efektif. Di Amerika Serikat, *exclusionary rule* dan berbagai pengecualiannya berfungsi sebagai penghalang terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan penegak hukum, terutama dalam konteks penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. Tanpa mekanisme ini, ada risiko bahwa penegak hukum akan cenderung melanggar hak-hak terdakwa, sehingga pada gilirannya dapat merusak keadilan prosedural serta integritas sistem peradilan pidana. Penerapan ketat terhadap aturan ini juga menciptakan efek jera bagi penegak hukum agar mereka selalu berhati-hati dalam menjalankan kewenangan mereka. Dengan demikian, *suppression of evidence* bukan hanya soal menjaga keadilan bagi terdakwa, tetapi juga soal menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat yang demokratis.

Penerapan ketat *suppression of evidence* telah memicu kekhawatiran bahwa sistem peradilan pidana bisa menjadi kurang efektif proses peradilan. Untuk menyeimbangkan perlindungan hak-hak terdakwa dengan kepentingan publik, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memperkenalkan beberapa pengecualian, seperti *good faith exception* dan *inevitable discovery rule* yang memberikan fleksibilitas. Meskipun *suppression of evidence* sering kali menimbulkan kritik terkait dampaknya terhadap penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan kejahatan serius, doktrin ini tetap penting untuk melindungi hak-hak konstitusional individu di Amerika Serikat.

DAFTAR REFERENSI

- Agnatieva, A. I. (2021). Features of Personal Rights and Freedoms in the United States. *Almanac of International Law*, 25(1): 57-64.
- Ansems, L. F. M., Bos, K. V. D., & Mak, E. (2020). Speaking of Justice: A Qualitative Interview Study on Perceived Procedural Justice Among Defendants in Dutch Criminal Cases. *Law & Society Review*, 54(3): 643-679.
- Bilz, K. (2012). Dirty Hands or Deterrence? An Experimental Examination of the Exclusionary Rule. *Journal of Empirical Legal Studies*, 9(1): 149-171.

- Calabresi, G. (2003). The Exclusionary Rule. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 26(1): 111-118.
- Cammack, M. (2010). The Rise and Fall of the Constitutional Exclusionary Rule in the United States. *The American Journal of Comparative Law*, 58(1): 631-658.
- Faqihi, A. M. A. (2022). Evidence Derived from the Invalid Procedures and the Consequences. *Journal of King Abdulaziz University Arts and Humanities*, 30(1): 275-303.
- Gau, J. M. (2015). Procedural Injustice, Lost Legitimacy, and Self-Help. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 31(2): 132-150.
- Kerr, O. S. (2015). Executing Warrants for Digital Evidence: The Case for Use Restrictions on Nonresponsive Data. *Texas Tech Law Review*, 48(1): 1-36.
- Kurniawan, Z., Tisnanta, H. S., Fakhri, M., & Ferdiansyaah, A. I. (2022). Exclusionary Rule Principle and Constitutional Rights Protection in Evidence Seeking. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 10(4): 864-871.
- Levine, K. L., Turner, J. I., & Wright, R. F. (2016). Evidence Laundering in a Post-Herring World. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 106(4): 627-680.
- Liu, S., & Nir E. (2021). Mission Impossible? Challenging Police Credibility in Suppression Motions. *Criminal Justice Policy Review*, 33(6): 584-607.
- Ma, Y. (1999). Comparative Analysis of Exclusionary Rules in the United States, England, France, Germany, and Italy. *Policing*, 22(3): 280-303.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2020). *Hukum Acara Pidana Adversarial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Natamiharja, R., Sabatira, F., Banjarani, D. R., Davey, O. M., & Setiawan, I. (2022). Balancing Two Conflicting Perspectives on Wiretapping Act: Rights to Privacy and Law Enforcement. *Al Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(1): 18-30.
- Nie, E. (2019). Empowering the Exclusionary Rule: Using Suppressing Motion Data to Improve Police Searches and Searches in the United States. *International Journal of Police Science & Management*, 22(1): 96-107.
- Ridder, C. K. (2009). Evidentiary Implications of Potential Security Weaknesses in Forensic Software. *International Journal of Digital Crime and Forensics*, 1(3): 80-91.
- Shapiro, S. J. (1990). Reviewing the Unreviewable Judge: Federal Prosecution Appeals of Mid-Trial Evidentiary Rulings. *The Yale Law Journal*, 99(4): 905-924.

- Simović, M. N, & Hrustić (2020). The Main Characteristics of Criminal Proceedings in England. *Godišnjak Pravnog Fakulteta u Banja Luci*, 42(1): 9-42.
- Skoreiko. V. V. (2023). Inadmissible Evidence in Criminal Proceedings: Some Aspect of Applying the “Fruit of the Poisonous Tree” Doctrine. *Law and Society*, 5(1): 296-304.
- Summers, S. J. (2023). The Epistemic Ambitions of the Criminal Trial: Truth, Proof, and Rights. *International Journal on Evidential Legal Reasoning*, 4(1): 249-272.